

SKRIPSI

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia)

Diajukan Oleh

Nadya Aini Januar

4518013106



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT Pos Indonesia)

Nama Mahasiswa : Nadya Aini Januar

Stambuk/NIM : 4518013106

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : PT Pos Indonesia

Telah Di Setujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M.Kes


Rifa Fajarina Laming, SE, M.Si, AK., CA

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi


Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE.,MM


Thanwain, SE.,M.Si

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Aini Januar
Nim : 4518013106
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance *Governance* (Studi Kasus pada PT Pos Indonesia)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemapran asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademika disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 12 September 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



Nadya Aini Januar

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia)

NADYA AINI JANUAR
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

ABSTRAK

NADYA AINI JANUAR. 2021. Skripsi Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia) dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M.Kes dan Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si., Ak.,CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran audit internal yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Objek Penelitian di PT Pos Indonesia yang berkantor di Jl. Slamet Riyadi No. 10, Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang. Menggunakan penelitian Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan audit internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia bersangkutan dengan 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kewajaran yang telah dijalan oleh PT Pos Indonesia yang sudah cukup baik. Peranana audit intenal yang berfungsi sebagai organ pendukung untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas monitoring evaluasi, supervise, dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Peran Audit Internal

**THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN REALIZING GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
(Case Study at PT Pos Indonesia)**

NADYA AINI JANUARY
*Accounting Study Program, Faculty of Economics
Bosowa University*

ABSTRACT

NADYA AINI JANUARY. 2021. Thesis on the Role of Internal Audit in Realizing Good Corporate Governance (Case Study at PT Pos Indonesia) supervised by Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M.Kes and Ripa Fajarina Laming, SE, M.Sc., Ak., CA.

The purpose of the study was to determine the role of internal audit carried out by PT Pos Indonesia in realizing Good Corporate Governance. The object of research at PT Pos Indonesia which has an office on Jl. Slamet Riyadi No. 10, Bulu Gading, Ujung Pandang District. Using qualitative research method.

The results of the study indicate that the role of internal audit in realizing Good Corporate Governance at PT Pos Indonesia is related to the 5 principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness that have been carried out by PT Pos Indonesia which are already quite good. The role of internal audit which functions as a supporting organ to assist the board of commissioners in carrying out the task of monitoring evaluation, supervision, and supervising to the management of the company.

Said Key : Good Corporate Governance , Internal Audit Roles

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia)”**. Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa. Disamping itu, penulis skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa/i Akuntansi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena masalah yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan kekuatannya di sepanjang hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala teguran serta peringatan yang terus di berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Orang tua tercinta, bapak Januar Ikhsan, dan ayah Haerul, serta *my support system number one* ibu Dr. Ariana Yunus M.Si yang selalu menjadi

penyemangat terbesar sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta doa yang tiada henti hentinya dipanjatkan untuk penulis.

3. Nenek tercinta, ibu Prof. Dr. Hj. Melati Pabittei M.Si yang tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terhormat, Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Yang terhormat Ibu Dr. HJ. Herminawati Abubakar SE., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
6. Yang Terhormat Bapak Dr. Firman Menne, SE.,M.Si., Ak.,CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
7. Yang terhormat Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si., Ak.,CA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan dorongan baik itu berupa semangat, *sharing*, ilmu dan doa.
8. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Yang terhormat Dosen Penguji skripsi Ibu Dr. HJ. Herminawati Abubakar SE., M.Si. dan bapak Thanwain .
10. Yang terhormat PT Pos Indonesia atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.

11. *Best partner*, Saharuddin S.T yang selalu menemani, memberikan semangat dan menghibur penulis ketika merasa *down* dalam menyelesaikan studi ini.
12. *Best bro and sist*, Dhita Pratiwi Ch. SE, Ilmi Amaliah S.Psi, Rezky Jaya Saputri SE, Anneke Putri S.Psi, Irma Suryani Sulaiman S.Psi, Anggar Budhi Waluyo yang tidak pernah absen untuk memberikan semangat dan bantuan disaat penulis mengalami kesulitan menyelesaikan studi ini.
13. Terimakasih juga untuk teman-teman kelas tercinta Akuntansi C 2017 dan Akuntamsi A 2018.
14. Terima kasih juga untuk teman-teman HIPMI PT UNIBOS dan UKM Kewirausahaan yang selalu *support*.
15. *And last but not lest. Dear self, I know it's not easy to get to this step but I can't stop saying thank you for being strong. You are great. Thank you ego for giving in everything you did to achieve this wasn't in useless. All the heavy burdens have passed, it's time to manage a new plan for the challenge of the world.*

Dalam menyusun skripsi ini penulis sadar bahwa yang ada dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 12 September 2021

Nadya Aini Januar

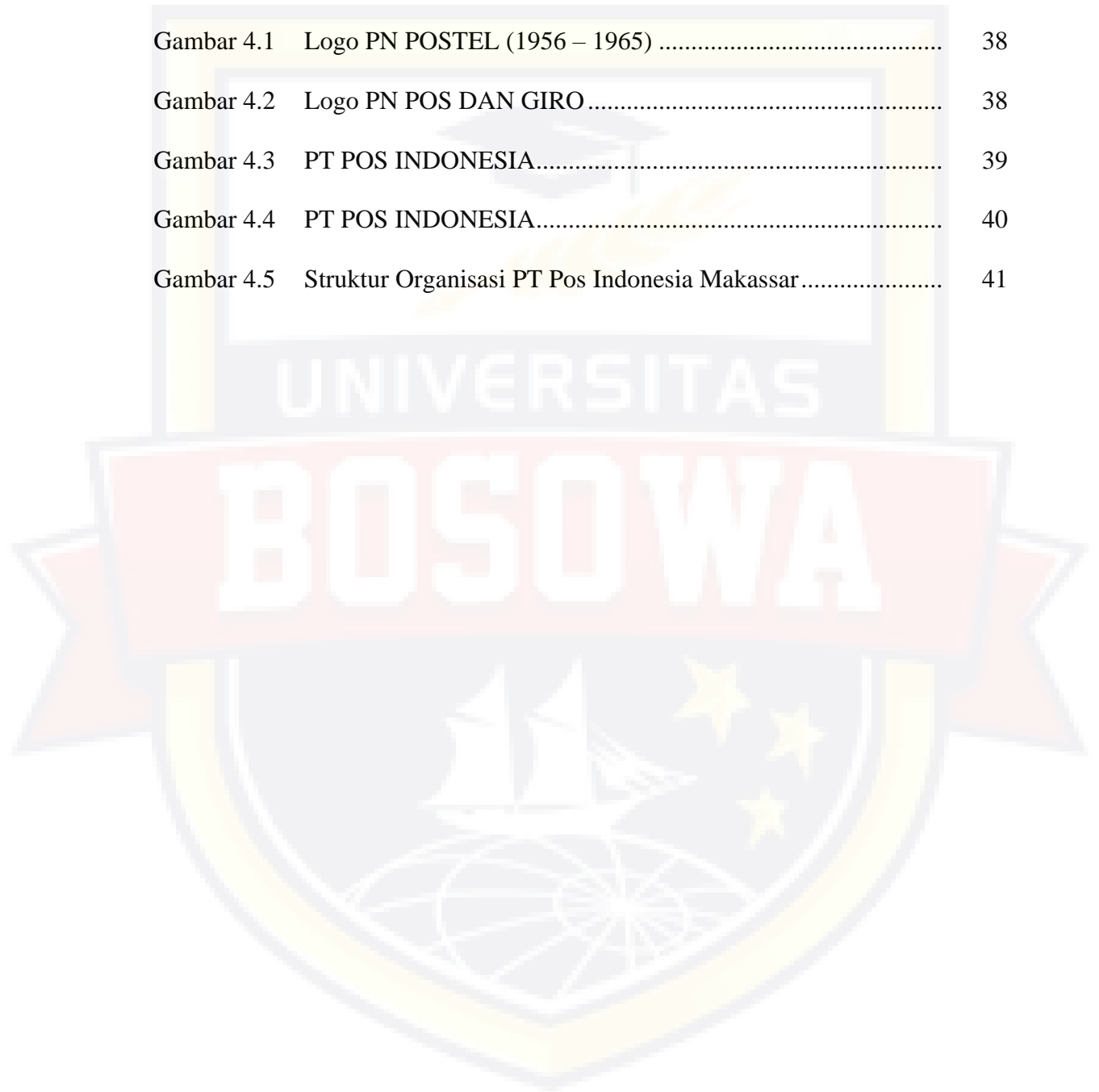
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Audit Internal	5
2.1.1 Pengertian Audit Internal	5
2.1.2 Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal ...	7
2.1.3 Peran Audit Internal	9
2.1.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal	11
2.1.5 Standar Profesional Audit Internal	12
2.1.6 Laporan Audit Internal	16
2.1.7 Ruang Lingkup Audit Internal	18

2.2	<i>Good Corporate Governance</i>	19
2.2.1	Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.2.2	Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	21
2.2.3	Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.3	Kaitan Audit Internal Dengan <i>Good Corporate Governance</i>	25
2.4	Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	27
3.2	Metode Pengumpulan Data	27
3.3	Jenis dan Sumber Data	28
3.4	Metode Analisis	29
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	35
4.2	Pembahasan	50
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1	Logo PN POSTEL (1956 – 1965)	38
Gambar 4.2	Logo PN POS DAN GIRO	38
Gambar 4.3	PT POS INDONESIA.....	39
Gambar 4.4	PT POS INDONESIA.....	40
Gambar 4.5	Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Makassar	41



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, aktivitas dan permasalahan yang dihadapi perusahaan menjadi semakin kompleks dan sulit untuk mengontrol seluruh aktivitas dan operasional perusahaan, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran, pemborosan dan kecurangan. Masalah internal yang muncul di perusahaan ini merupakan pertanda bahwa fungsi-fungsi di dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik dan konsisten. Hal ini berdampak pada tata kelola perusahaan yang tidak berjalan dengan baik.

Di Indonesia, prinsip corporate governance telah diterapkan sejak penandatanganan LOI (Letter of Intent) dengan IMF, dan salah satu faktor utamanya adalah pencantuman jadwal perbaikan corporate governance Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional percaya bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan

standar tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan di tingkat nasional. Namun, meskipun memahami pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, banyak pihak juga melaporkan beberapa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dibandingkan dengan mereka yang memandang prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari budaya perusahaan, banyak perusahaan yang masih menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mendorong regulasi dan menghindari sanksi yang ada (Sapceпти, 2017).

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan telah menarik dana pemerintah. Menurut Maki Boyamin Saiman (kompas.com), PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik negara yang dituding tidak jujur membayar bonus kepada direksi dan anggotanya pada 2017, menurut Maki Boyamin Saiman (kompas.com). Namun, perusahaan mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan laporan keuangan PT Pos Indonesia pada tahun yang sama. “Ada upaya untuk merancang buku besar, seperti menjual aset saham di Bank Mantap untuk mendapatkan keuntungan,” kata Boyamin. Mandiri Taspen Pos) Kerugian Rp 5.359.000.000. Pemberian tantiem apabila perusahaan merugi akan tergolong merugikan negara dan dapat berujung pada tindak pidana korupsi,” Boyamin juga melampirkan daftar pembayaran tantiem kepada direksi, Laporan Laba Rugi PT Pos Indonesia. Dan selama audit dengan Kantor Pos Makassar yang disetujui, kami menerima informasi bahwa telah terjadi penyimpangan dari catatan, kemungkinan kesalahan dalam pencatatan ini atau bahwa perusahaan telah menderita kerugian karena penipuan penutupan buku. Peneliti ingin melakukan penelitian.

Konflik audit ini terjadi ketika Audit Internal melakukan kegiatan audit internal. Auditor internal, sebagai karyawan organisasi yang diaudit, menghadapi tantangan ketika mereka harus melaporkan hasil negatif ketika mengevaluasi efektivitas manajemen atau audit yang mereka lakukan. Ini menghadirkan dilema etika ketika manajemen atau auditor memberi penghargaan atau menekan auditor internal untuk menghasilkan laporan audit yang diinginkan manajemen. Untuk itu, auditor menghadapi keputusan etis dan tidak etis (Hasibuan, 2018).

Oleh karena itu, peran audit internal dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting karena audit internal merupakan fungsi evaluasi yang berkembang secara bebas dalam suatu organisasi. pengujian dan evaluasi kinerja sebagai bentuk pelayanan kepada perusahaan (Hery, 2017). Pentingnya proses audit internal yang efektif untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan dan ketidakefisienan dalam program yang direncanakan dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menduga adanya hubungan antara audit internal dan *Good Corporate Governance* yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Peranan Audit Internal Terhadap *Good Governance* pada PT Pos Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah : Apakah audit internal berperan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

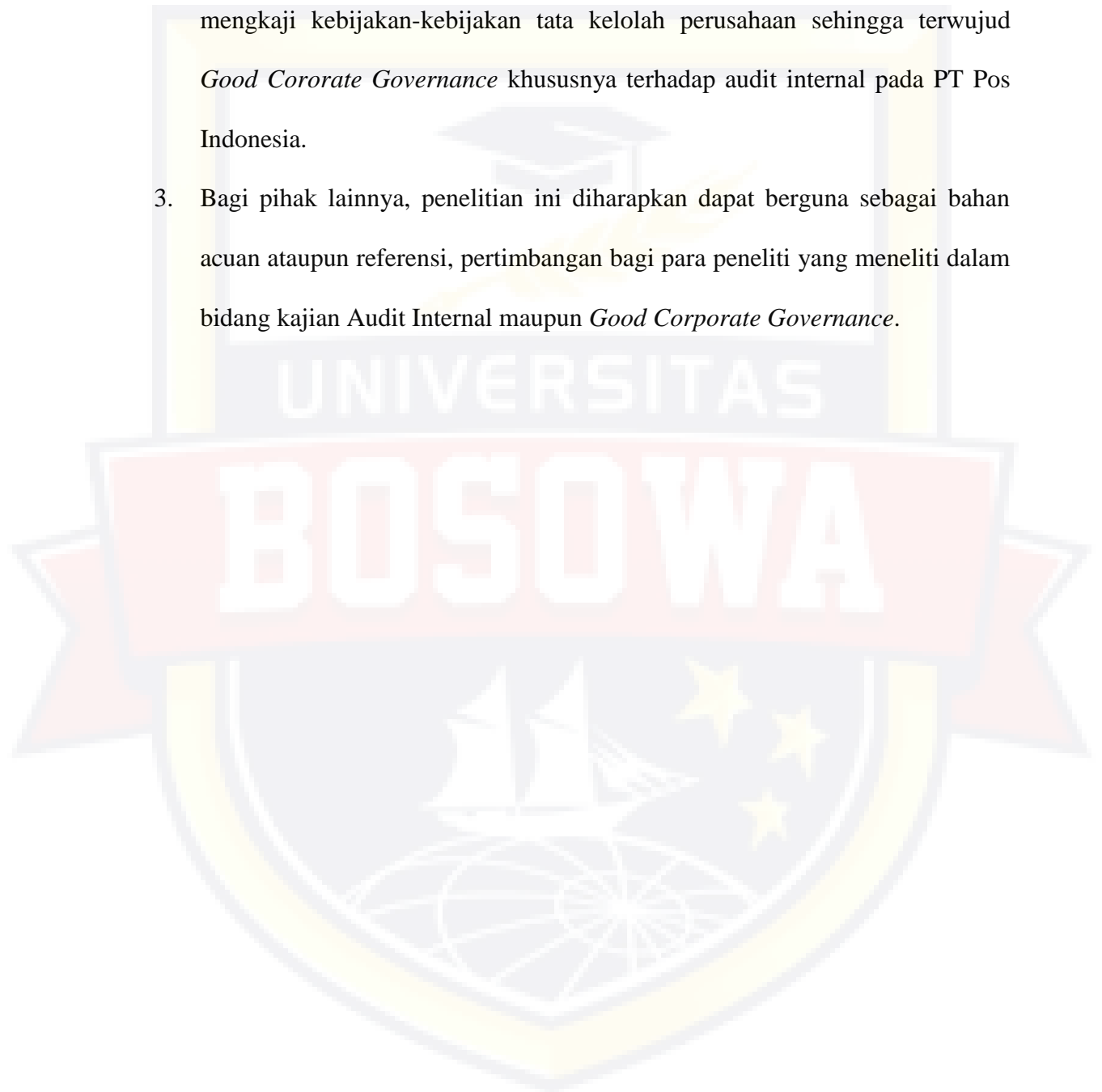
Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran audit internal yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis ini dapat memberikan ilmu dan wawasan mengenai audit internal *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia.

2. Bagi perusahaan adalah setelah penelitian ini dilakukan dan mendapatkan hasil yang kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk membuat dan mengkaji kebijakan-kebijakan tata kelolah perusahaan sehingga terwujud *Good Cororate Governance* khususnya terhadap audit internal pada PT Pos Indonesia.
3. Bagi pihak lainnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan ataupun referensi, pertimbangan bagi para peneliti yang meneliti dalam bidang kajian Audit Internal maupun *Good Corporate Governance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Saat ini, profesi audit internal terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan kebutuhan ekonomi yang menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya secara profesional, yang berarti penyediaan sumber daya yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan perkembangan tersebut, muncul tuntutan terhadap fungsi audit internal. Tujuan dari internal audit adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Untuk itu, auditor internal akan melakukan analisis, penilaian, serta memberikan rekomendasi dan saran-saran.

Audit internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan (Hery, 2017). Audit internal merupakan fungsi evaluasi independen dalam organisasi yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi (Ahmad, 2020). Audit internal merupakan suatu konsultasi yang independen dan objektif yang dibangun untuk menambah nilai serta memperbaiki sistem organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian dan pengelolaan (Suripatty, 2021). Internal audit adalah pelaksanaan audit/auditor yang

menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi, menetapkan apakah pengelolaan aset organisasi/perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai keefektifitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam organisasi/perusahaan (Cahyani, 2020). Hasil dari audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan diandalkan oleh informasi.

Dalam Standar Profesional Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal, mengatakan bahwa audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi independent serta objektif yang meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance. Sehingga audit internal merupakan suatu penilaian yang objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir
3. Peraturan eksternal dan kebijakan serta prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Temuan dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Dari definisi tersebut, semakin jelas bahwa fungsi audit internal masa kini tidak lagi hanya terbatas dalam audit keuangan dan organisasi atau perusahaan saja, tetapi memberikan jasa konsultasi yang dapat menambah nilai organisasi atau perusahaan agar dapat mencapaitujuannya. Oleh karena itu, auditor internal harus memiliki latar belakang yang luas mencakup seluruh fungsi organisasi termasuk teknologi informasi. Hal ini disebabkan munculnya fungsi baru dalam fungsi audit internal yaitu sebagai konsultan bagi manajemen dalam peningkatan manajemen risiko dan pengendalian tata Kelola organisasi atau perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa audit internal adalah aktivitas yang memberikan pelayanan kepada manajemen yang meliputi audit dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi perusahaan.

2.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Audit Internal

Secara umum audit internal memiliki tujuan untuk membantu manajemen menjalankan tugasnya, dengan menyediakan informasi tentang kelayakan dan keefektifan dalam pengendalian intern perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktivitas perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran. Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004:81) menyatakan bahwa : “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter* audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal yang

mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.

Menurut Hartono (2017) tujuan audit internal, yaitu :

- a. Menilai dan menentukan kebijakan, rencana, dan prosedur yang ingin dipilih.
- b. Menilai dan meneliti pelaksanaan ataupun pengendalian internal bidang akuntansi dan operasi cukup untuk memenuhi syarat.
- c. Menilai ketepatan data akuntansi dan data lain dalam organ perusahaan.
- d. Menilai mengenai aktiva perusahaan keseluruhan dengan kenyataan yang ada.
- e. Menilai mutu ataupun pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen.

Fungsi audit internal yang terperinci dan relatif lengkap menunjukkan bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Divisi audit internal merupakan bagian integral dari organisasi dan berfungsi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab divisi audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis formal, misalnya dalam anggaran organisasi. Anggaran organisasi harus menerangkan tentang tujuan divisi audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa divisi audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang diperiksa. Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan. Manajemen mungkin tidak dapat mengawasi semua kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, fungsi audit internal sangat membantu manajemen dalam menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatannya.

Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan fleksibel meliputi seluruh tingkatan manajemen yang sifatnya administrative maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi berjalannya roda organisasi. Audit internal bukan hanya bertindak sebagai mata-mata tetapi juga merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi.

Menurut penjelasan diatas bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan fleksibel sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat peneliti ketahui bahwa sebagian besar audit internal ini bertugas untuk menentukan serta memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai menaksir, dan mengevaluasi pengendalian atau operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Seluruh hal tersebut dilakukan dengan posisi independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakuratan catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga pemberian konsultasi internal.

2.1.3 Peran Audit Internal

Peran audit internal sangatlah penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Peran audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi yang banyak, berinisiatif serta mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Konsep audit internal sangatlah perlu karena

bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan. Oleh karena itu semakin besar suatu perusahaan maka semakin luas pula rentang pengendalian yang dipikul pimpinan sehingga manajemen harus menciptakan suatu pengendalian internal yang efektif untuk mencapai suatu pengelolaan yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Karena keterbatasan manajemen dalam mengendalikan aktivitasnya, suatu perusahaan memerlukan audit internal yang akan membantu manajemen dalam menentukan apakah rencana operasi, keuangan, kebijakan, dan prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Seiring perkembangannya, peran yang dijalankan auditor internal digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. *Watchdog*

Watchdog merupakan peran auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, dan menghitung serta melakukan cek dan ricek (Erniwati, 2018). Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan dan fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam system pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaannya, peran *watchdog* biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2. Konsultan

Pada peran ini, manajemen melihat bahwa auditor dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran konsultan ini membawa auditor internal

untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

3. Katalisator

Peran dari internal audit sebagai katalisator berkaitan dengan quality assurance, sehingga internal audit diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Dalam perannya, katalisator, internal audit bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*. Dampak dari peran katalisator bersifat jangka panjang, karena fokus dari katalisator adalah nilai jangka panjang dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham (Cahyani, 2020).

2.1.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggung jawab audit internal harus ditetapkan secara jelas sesuai dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang dapat ditetapkan bagi audit internal, yaitu :

1. Menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktifitas dalam perusahaan.
2. Menguji keandalan pengendalian manajemen.
3. Tanpa Batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, pelaporan serta harta milik perusahaan.

Audit internal memiliki tanggung jawab yang penting, yaitu memataui kinerja pengendalian internal dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami penendalian internal, ia harus berusaha memahami fungsi audit

internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit internal tersebut. Tanggung jawab seorang audit internal menurut SPAP Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2018), yaitu auditor bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya.

2.1.5 Standar Profesional Audit Internal

Standar profesi audit internal mutlak diperlukan untuk menjaga profesional dalam profesi audit internal. Standar profesi diperlukan untuk dijadikan sebagai patokan bagi auditor internal untuk melaksanakan pekerjaannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang pada akhirnya akan merugikan profesi audit internal itu sendiri. Tujuan dari Standar Profesi Audit Internal, yaitu :

- a. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu.
- b. Menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal.
- c. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
- d. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi.

- e. Menjadi acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan auditor internal.
- f. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.

Dalam Standar Profesional Auditor Internal berisi Standar Implementasi, yaitu :

1. Independensi

Menurut Ode (2017) independensi seorang auditor adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Independensi yang dimaksudkan meliputi indenpendensi dalam kenyamanan dan dalam penampilan. Indenpendensi dalam kenyataan lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.

2. Kemampuan Profesional

Kemampuan professional adalah tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Selain itu, auditor juga harus memiliki keahlian di bidang *auditing* dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya. Kompetensi seorang auditor di bidang *auditing* ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman

yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idelanya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan di bidang *auditing*.

3. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan (Ode, 2017).

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan merupakan kegiatan pemeriksaan yang harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, serta pemberitahuan hasil. Pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan program audit yang telah disusun oleh auditor internal sebelumnya.

5. Manajemen Bagian Audit Internal

Manajemen bagian audit internal dinyatakan bahwa pimpinan audit internal harus mengelolah bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga :

- a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen dan diterima oleh dewan.
- b. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
- c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengembangkan tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karenanya, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor menetapkan kode etik bagi para auditor internal. Kode etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Menurut SPAI, standar perilaku Qualified Internal Auditor, yaitu :

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayaninya. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia: (a) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (b) secara melanggar hukum, (c) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi kinerja kegiatan yang direview, dan menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

2.1.6 Laporan Audit Internal

Menurut Erniwati (2018), hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu sebagai

media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Materi atau isi laporan audit internal, antara lain :

1. Suatu laporan yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai.
2. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final.
3. Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu.
4. Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil audit juga pendapat auditor.
5. Laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta korektid yang memuaskan.
6. Pandangan tentang *auditee* tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam laporan audit.
7. Direktur audit internal harus me-review dan menyetujui laporan audit fina sebelum diterbitkan serta harus memurtuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan.

Laporan dari bagian audit internal merupakan alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pemimpin perusahaan. Adapun tujuan dari laporan audit internal, yaitu :

1. Laporan auditor merupakan kesimpulan hail pemeriksaan.
2. Menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

3. Sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi.

2.1.7 Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administrative maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal ini membantu manajemen dalam mengawasi berjalannya roda organisasi. Namun demikian audit internal bukan sebagai mata-mata melainkan merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi.

Auditor internal memiliki ruang lingkup yang luas dan fleksibel yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan dari manajemen. Auditor memiliki tugas untuk menentukan, menverifikasi, atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir, atau mengevaluasi penengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Semua hal tersebut dilakukan dengan independensi dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi pula segala hal yang dilkauan sejak memeriksa keakuratan catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi sehingga pemberian konsultasi internal. Selanjutnya, lingkup pekerjaan audit internal adalah menilai:

- a. Cukup tidaknya pengendalian internal.
- b. Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.

- c. Realibilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk membantu para organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.
- d. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan.
- e. Verifikasi dan perlindungan harta.
- f. Keekonomisan atau kehematan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya.

2.2 Good Corporate Governance

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Dalam bahasa Indonesia, Good Corporate Governance (GCG) diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum, istilah GCG diartikan sebagai suatu sistem pengendalian dan peraturan bagi perusahaan yang ditinjau dari mekanisme hubungan yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengurusan perusahaan tersebut maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terdapat dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri.

Dikutip oleh Sutjono dan Aldrige (Pratiwi, 2016) menyatakan pengertian Corporate Governance, yaitu sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Menurut surat keputusan Menteri BUMN nomor 112 tahun 2002 pasal 1 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN, yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Konsep GCG ini merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu struktur GCG seharusnya mencakup, antara lain:

1. Adanya pemisahan antara hak dan pertanggung jawaban antara pelaku dalam perusahaan, seperti manajemen, pemegang saham, dan stakeholder. Disamping itu harus terdapat pemisah yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan.
2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka secara singkat GCG dapat disimpulkan bahwa suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hal ini terjadi karena GCG dinilai mampu mendorong terbentuknya pola manajemen yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan prinsip GCG pada perusahaan diharapkan mampu untuk menarik minat investor baik domestic maupun investor asing.

2.2.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Pada penerapannya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik perlu dibangun serta dikembangkan perusahaan harus membangun sistem serta pedoman tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan serta dipertanggungjawaban oleh perusahaan. Prinsip GCG yang dikembangkan menurut OECD, antara lain :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pada Prinsipnya akuntabilitas dalam *good corporate governance* berisi tentang kewenangan yang dimiliki oleh dewan komisaris serta direksi. Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan haruslah dikelola dengan benar, terukur serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Kewajaran

Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang adil dari perusahaan.

Pemberlakuan prinsip ini pada perusahaan akan melarang praktek-praktek tercelah yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Prinsip kewajaran ini dijadikan suatu alat untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. Prinsip kewajaran juga harus memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara efektif. Hal tersebut dinilai menjadi penting karena dianggap mampu menjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham maupun, tanpa ada pengecualian.

3. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Pada prinsipnya informasi yang diungkapkan yaitu keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga haruslah mampu mengambil inisiatif dalam mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh perundang-undangan tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kerditur dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pada prinsip pertanggungjawaban ini menekankan pada

adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam GCG yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan lainnya. Prinsip pertanggungjawaban ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan seluruh kegiatannya secara bertanggung jawab. Perusahaan juga harus memenuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

5. Kemandirian

Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk terciptanya pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan haruslah dikelola secara independen sehingga diharapkan masing-masing divisi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak adanya intervensi dari pihak lain.

2.2.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Erniwati (2018), penerapan GCG diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain :

1. Menurunkan resiko

Dengan menerapkan GCG akan dapat meminimalisasi praktik-praktik yang menimbulkan sekat yang terjadi pada perusahaan.

2. Meningkatkan nilai saham

Diterapkannya GCG merupakan indikator perusahaan telah dikelola baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor publik terhadap perusahaan, dengan meningkatnya kepercayaan akan menjadikan nilai sahamnya banyak diminati di bursa, sehingga berdampak positif bagi kenaikan saham.

3. Menjamin kepatuhan

Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur operasi perusahaan dituntut untuk mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

4. Memiliki daya tahan

Dengan menerapkan GCG, perusahaan akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha sekitarnya.

5. Memicu kinerja

Melalui mekanisme *supervise* kinerja manajemen dan mempertegas pertanggungjawaban komisaris dan direksi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya memicu jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan.

6. Meningkatkan akuntabilitas publik

GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh *stakeholders* dan ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik.

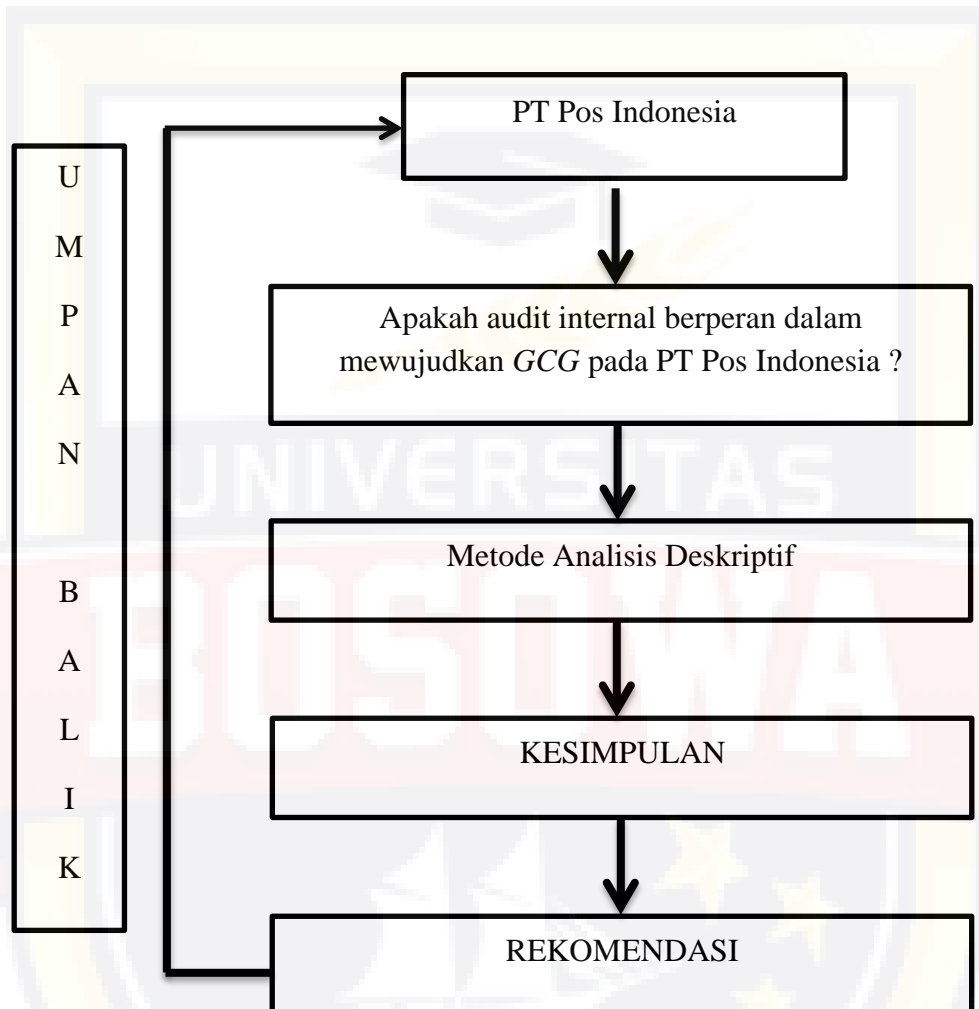
2.3 Kaitan Audit Internal Dengan *Good Corporate Governance*

Salah satu faktor yang cukup signifikan dalam proses implementasi GCG yaitu fungsi pengawasan internal yang baik yang dilakukan oleh auditor internal. Dengan demikian eksistensi departemen audit internal itu sendiri merupakan salah satu wujud implants dari GCG, selain itu audit internal berperan sangat strategis dalam membantu perusahaan dalam upaya mewujudkan GCG ke dalam praktik-praktik bisnis manajemen. Pengawasan internal menurut ketentuan GCG adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian sehubungan dengan kebenaran informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan, serta kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam kaitannya dengan penerapan GCG, audit internal mempunyai peranan yang sangat besar untuk mendorong terwujudnya pengelolaan bisnis perusahaan yang bersih dan transparan. Dari pemahaman tentang fungsi pengawasan internal dapat diketahui bahwa salah satu tugas audit internal yaitu melakukan review terhadap sistem yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan termasuk prinsip-prinsip yang berada dipedoman.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangk Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Pos Indonesia yang berkantor di Jl. Slamet Riyadi No. 10, Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi (*Dokumen research*)

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi meliputi foto, gambar serta data-data yang akurat seperti laporan keuangan, rekapitulasi biaya sumber daya manusia. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan laporan-laporan yang berkaitan dengan peran audit internal dalam penerapan GCG di PT Pos Indonesia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian

2. Teknik Wawancara (*Interview research*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi (Iryana, 2018). Proses pengumpulan data menggunakan metode ini diawali

dengan peneliti memberikan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

3. Teknik Kepustakaan (*Library research*)

Teknik kepustakaan, yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian (Sari, 2020). Sumber informasi kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, artikel ilmiah, laporan-laporan, jurnal-jurnal serta media lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu penerapan akuntansi sumber daya manusia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung, melainkan dengan cara wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan. Misalnya wawancara singkat tentang struktur organisasi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden penelitian. Data ini diperoleh melalui proses wawancara

berdasarkan pada kumpulan pertanyaan yang terangkum dalam daftar pertanyaan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dll.

3.4 Metode Analisis

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam memperoleh temuan hasil penelitian. Menurut Miles dan Hiberman analisis data analisis kualitatif merupakan suatu data aktivitas dalam analisa kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berangsur secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Milers, Hiberman, dan Saldana (2014), komponen dalam analisis datanya adalah, sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada dilapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah maka akan menyulitkan peneliti. Oleh karena itu proses analisis data pada tahapan ini harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahapan ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan dapat ditarik serta diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data ini adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Namun pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman "*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan. Permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan

menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Pada ketiga jenis kegiatan tersebut, peneliti bergerak bolak balik antara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel merupakan indikator yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, maka dari itu definisi suatu variabel dapat dikemukakan sebagai berikut. Internal audit adalah aktifitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan khususnya pada PT Pos Indonesia. Adapun indikator variabel internal audit yang digunakan menurut Hery (2017), yaitu :

1. Independensi

independensi seorang auditor adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Independensi yang dimaksudkan meliputi indenpendensi dalam kenyamanan dan dalam penampilan. Indenpendensi dalam kenyataan lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak

manapun. Independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.

2. Kemampuan profesional

Kemampuan profesional adalah tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Selain itu, auditor juga harus memiliki keahlian di bidang *auditing* dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya. Kompetensi seorang auditor di bidang *auditing* ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idelanya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan di bidang *auditing*.

3. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal yang harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan merupakan kegiatan pemeriksaan yang harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, serta pemberitahuan hasil.

5. Manajemen Bagian Audit Internal

Manajemen bagian audit internal dinyatakan bahwa pimpinan audit internal harus mengelolah bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga :

- a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen dan diterima oleh dewan.
- b. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
- c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Penerapan GCG merupakan komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan antara stakeholders dengan stakeholders untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, khususnya pada PT Pos Indonesia, GCG ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator menurut Valery (2011:22), yaitu:

1. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian

Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Kemandirian

Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi, No. 10, Bulu Gadin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulisan dan penelitian ini dilakukan mulai dari minggu ke-4 Maret 2021. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara pada bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan auditor. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan.

4.1.1 Sejarah PT Pos Indonesia

Kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Barin Van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746, dengan tujuan untuk melindungi surat-surat dan dokumen-dokumen bagi penduduk yang bertransaksi di cabang-cabang di luar Jawa dan bagi penduduk yang pulang dan pulang dari Belanda. Sejak saat itu, posisi ini hadir untuk memenuhi peran dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Empat tahun kemudian, Kantor Pos Batavia, kemudian Kantor Pos Semarang dibuka.

Pos Indonesia Perubahan status terjadi beberapa kali, dimulai dari Pos, Telegraf, Telepon (PTT) Javata. Kemudian terus berkembang hingga memperoleh status Perusahaan Pos dan Telekomunikasi Negara (GP Postel). Seiring perkembangan zaman, bidang komunikasi pos berkembang sangat pesat dan

berubah menjadi PN Pos dan Giro pada tahun 1965 dan Perum Pos dan Giro pada tahun 1965.

Sejak saat itu dicita-citakan sebagai instansi pemerintah, dan merupakan satu-satunya usaha organisasi Dinas Pos dan Giro Pos, baik internal maupun eksternal. Setelah 17 tahun berstatus Perum sejak 1995 hingga kini berubah menjadi perseroan terbatas bernama PT Pos Indonesia (Persero). Sampai PT Pos Indonesia telah mampu meningkatkan infrastruktur dan jaringan untuk meningkatkan kreativitas dan pengembangan di sektor Pos Indonesia. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia dapat menjangkau hampir seluruh kota dan wilayah Indonesia. Selain itu, PT Pos Indonesia dapat menjangkau 45% dari total kecamatan dan desa serta 940 lokasi pemukiman terpencil di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena PT Pos Indonesia memiliki sekitar 24.000 titik layanan di Indonesia. Keberhasilan lain dari

Kemampuan PT Pos Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan informasi, komunikasi dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kota di Indonesia memiliki hampir 3.800 kantor pos online dengan meja kas elektronik mobile. Semua layanan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia sudah terhubung dan terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan proses layanan pos, dan PT Pos Indonesia juga telah mengembangkan sistem kode pos khusus. Pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia berlangsung baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan ditandai dengan kerjasama dengan organisasi komersial di negara lain, seperti Western Union.

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Tata Nilai PT Pos Indonesia

4.1.2.1 Tujuan PT Pos Indonesia

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh perseroan adalah membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera.

4.1.2.2 Visi PT Pos Indonesia

Visi yang dimiliki PT Pos Indonesia yaitu untuk menjadi Postal Operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif.

4.1.2.3 Misi PT Pos Indonesia

Misi yang dimiliki PT Pos Indonesia yaitu bertindak efektif untuk mencapai *performance* terbaik.

4.1.2.4 Nilai – Nilai Utama PT Pos Indonesia

Nilai-nilai utama yang PT Pos Indonesia miliki dirumuskan dengan akronim AKHLAK. Deskripsi AKHLAK ini, yaitu :

1. Amanah, yaitu PT Pos Indonesia memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten, yaitu Perusahaan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis, yaitu suatu nilai perusahaan untuk saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif, yaitu suatu nilai yang dipegang oleh PT Pos Indonesia untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan untuk menghadapi perubahan.

6. Kolaboratif, yaitu Komitmen dari PT Pos Indonesia untuk membangun kerjasama yang bersinergi.

4.1.3 Makna Logo PT Pos Indonesia



Gambar 4.1 Logo PN POSTEL (1956 – 1965)
Sumber : PT Pos Indonesia (2021)

Perubahan status yang PT Pos Indonesia lakukan juga tercermin dari logo yang dimilikinya. Dari tahun 1956 sampai dengan 1965, logo PN POSTEL yang ditunjukkan pada gambar 4.1. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965, PN POSTEL dibagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).



Gambar 4.2 Logo PN POS DAN GIRO
Sumber : PT Pos Indonesia (2021)

Logo PN Pos dan Giro ini terdiri dari unsur-unsur, yaitu padi dan kapas, banner atas dengan tulisan Republik Indonesia (RI), banner bawah dengan tulisan POS dan GIRO, selain itu juga mempunyai segi lima yang mengurung

bola dunia dan burung. Untur terakhir yang bisa ditemui adalah arsiran horizontal antara segi lima dan padi kapas.

Maksud dari logo ini adalah burung, menjadi simbol yang mewakili merpati pos yaitu konsep dari pengantaran surat pada jaman dahulu. Unsur selanjutnya dari logo tersebut adalah bola dunia yang menjadi lambing dari perputaran dunia dan kekelan yang mengisyaratkan hubungan antar negara, internasional, dan global. Padi dan kapas pada logo tersebut menjadi simbol keadilan sosial dari pancasila.



Gambar 4.3 PT POS INDONESIA

Sumber : PT Pos Indonesia (2021)

Logo PT Pos Indonesia ini mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 166/Dirut/1995 pada tanggal 13 September 1995 dan juga Keputusan Direksi Nomor 172/Dirut/1997 pada tanggal 17 November 1997 tentang logo PT Pos Indonesia. Perubahan ini terlihat merpati yang tidak lagi terkurung oleh segi lima kapas. Alasan terjadinya perubahan logo yaitu unsur ini melambangkan bahwa PT Pos Indonesia siap melakukan kegiatannya ke seluruh dunia. Brung merpati pos yang digambarkan dengan sayap yag bergari-garis horizontal serta ukuran burung yang lebih memanjang dan mengecil diujung mengisyaratkan PT Pos Indonesia berjalan dengan semakin cepat. Ukuran burung

yang makin besar dari bola dunia memvisualisasikan bahwa PT Pos Indonesia mampu menguasai dunia. Warna utama dari logo ini melambangkan sesuatu yang penting dan juga dilengkapi dengan slogan “Untuk Anda Kami Ada” yang mengisyaratkan bahwa profesionalitas di bidang usaha.

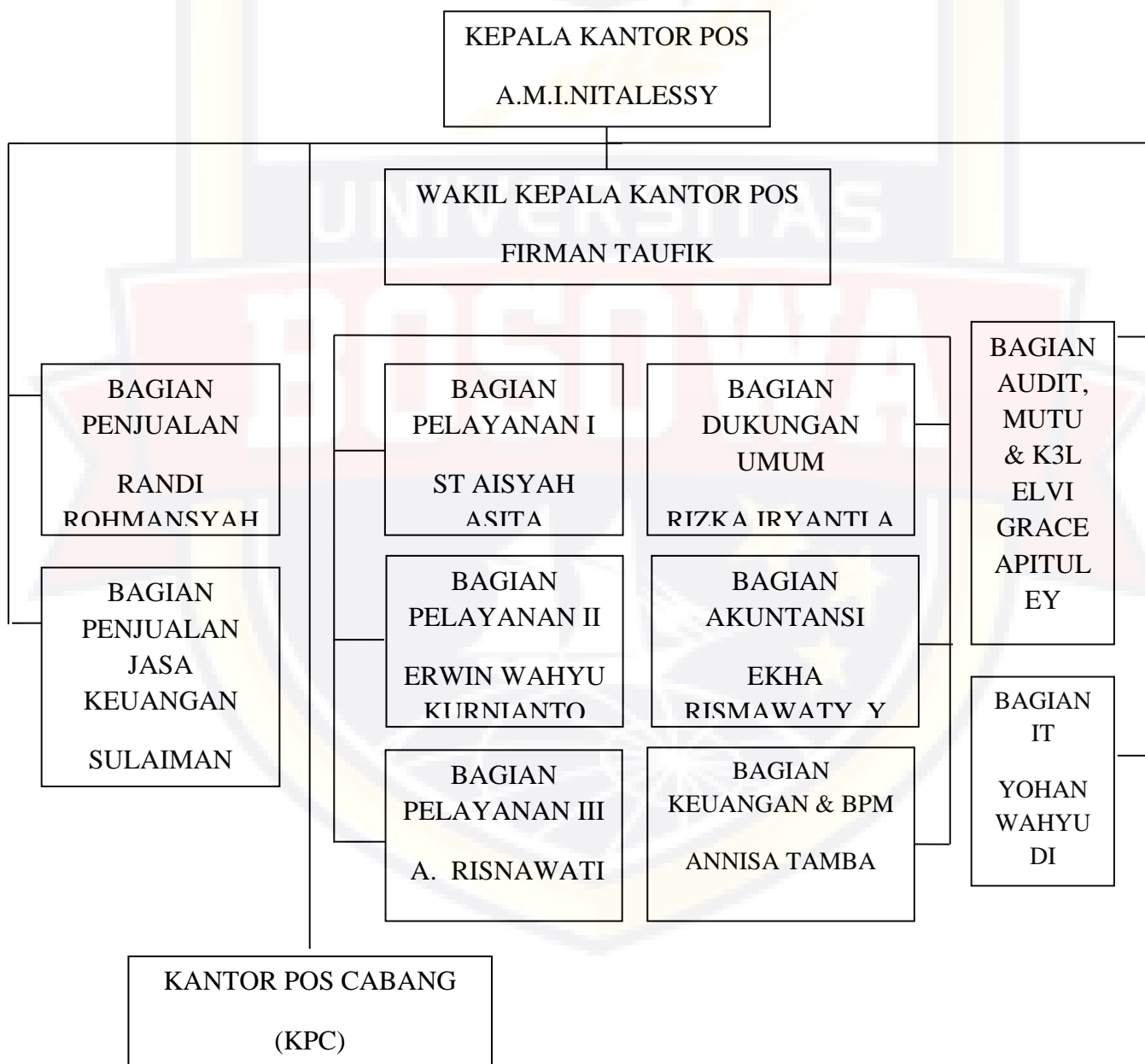


Gambar 4.4 PT POS INDONESIA
Sumber : PT Pos Indonesia (2021)

Perubahan terakhir yang dilakukan terhadap logo PT Pos Indonesia terjadi pada 1 November 2012 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 95/Dirut/1112. Logo dari PT Pos Indonesia ini memiliki makna, yaitu unsur burung merpati yang sedang terbang dengan pandangan lurus kedepan, dilengkapi dengan lima garis sayap yang memiliki bentuk garis-garis kecepatan, bermakna dalam menjalankan usahanya PT Pos Indonesia mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan terpercaya. Selanjutnya simbol bola dunia, mengisyaratkan pesan perusahaan sebagai penyelenggara layanan yang mampu menjadi sasaran komunikasi dalam lingkup nasional maupun internasional. *Font* POS INDONESIA ditulis dengan *Futura Extra Bold* yang bermakna dinamis dan cepat. Warna abu-abu yang merupakan warna natural dengan makna modern dari sisi pendekatan bisnis.

4.1.4 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia

Penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia yang beralamat di Jalan Slanet Riadi Nomor 10, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur organisasi dari PT Pos Indonesia yaitu :



Gambar 4.5 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Makassar

Sumber : PT Pos Indonesia Makassar 90000 (2021)

Secara umum, terdapat 10 bagian dari PT Pos Indonesia cabang Makassar. Dibagian pimpinan kepa kantor pos dan wakio kepala pos, terdapat 10 bagian, yaitu bagian penjualanm bagian penjualan jasa keuanganm bagian pelayanan I, bagian pelayanan II, bagian pengawasan, bagian dukungan umum, bagian akuntansi, bagian keuangan, dan bagian BPM, bagian audit, mutu, dan K2L dan bagian IT, serta juga membawahi Kantor Pos Cabang.

4.1.5 Produk PT Pos Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman, PT Pos Indonesia menunjukkan keunggulannya dengan tidak hanya lagi berfokus pada layanan pengiriman surat namun, membuka juga jasa keuangan. PT Pos Inodoneia juga bukan hanya domestik akan tetapi juga internasional. Berikut ini adalah produk layanan yang telah disediakan oleh PT Pos Indonesia, yaitu :

1. Layanan Domestik

Layanan domestik yaitu layanan yang dibuka oleh PT Pos Indonesia yang menyediakan berbagai jenis pengirimkan dengan jangkauan nasional diantaranya adalah:

a. Layanan jasa kurir

Layanan kurir yaitu layanan pengiriman yang mengirimkan barang dan dokumen ke tujuan lokal, regional, dan nasional dengan waktu pengiriman tidak melebihi dari 14 hari. Dalam layanan jasa kurir menyediakan juga sejumlah layanan, yaitu :

1) Pos kilat khusus

Pos kilat khusus adalah paket pengiriman yang disediakan oleh PT Pos Indonesia dengan waktu pengiriman yaitu 2 sampai 9 hari yang dapat diantar ke rumah atau diambil langsung di kantor pos tujuan.

2) Pos *express*

Pos *express* merupakan salah satu layanan berkualitas yang disediakan oleh PT Pos Indonesia yang mengutamakan kecepatan, keamanan, dan jangkauan yang sangat luas di seluruh Indonesia.

3) Pos jumbo ekonomi

Pos jumbo ekonomi adalah paket layanan *express* nasional yang berat dasar mulai dari 3kg yang lebih kompetitif dibandingkan dengan paket lainnya.

4) *Q9 Same Day Service*

Q9 same day service adalah paket layanan premium lain yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia. Layanan ini sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan pengiriman di hari yang sama. Dengan layanan ini memungkinkan pengirimkan paket diterima pada hari yang sama atau 9 jam.

b. Layanan Logistik

Untuk jasa pengiriman barang PT Pos Indonesia telah membuka tiga paket layanan, yaitu :

1) Kargo

Untuk layanan kargo PT Pos Indonesia terbagi menjadi beberapa layanan, yaitu :

a. Kereta Ritel Kargo (KRT)

Kereta Ritel Kargo (KRT) sebagai layanan distribusi barang pos nasional yang menggunakan angkutan jenis kereta api selama proses pengangkutan dan proses distribusi.

b. Kargo udara ritel

Kargo udara ritel adalah pengangkutan barang dengan angkutan udara selama pengangkutannya.

c. Jenis sistem pelayanan kargo :

a. *Door to door* adalah sistem pengiriman dimana paket dikumpulkan dan diantar ke kantor pusat.

b. *Port to door* adalah layanan pengiriman yang dimana pengirim mengirimkan barang dagangan ke kantor pos dan kemudian mengantarkannya ke alamat yang diharapkan.

c. *Door to port* adalah layanan pengiriman yang dimana paket akan diterima di alamat pengirim dan pelanggan tujuan akan mengambilnya di kantor pos tujuan.

d. *Port to port* adalah bentuk layanan pengiriman dimana pengirim mengirimkan barang ke kantor pos kemudian pelanggan tujuan mengambil barang di kantor pos tujuan.

d. *Warehouse*

Warehouse merupakan layanan gudang yang menyimpan produk dalam jumlah dan periode yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan produksi

dan hasil produksi lalu diantarkan ke tempat yang ditentukan oleh pelanggan.

Kegiatan yang dilakukan pada layanan warehouse pos Indonesia adalah:

- a. Menyediakan, menyewakan, dan mengelola gudang.
 - b. Menerima dan memverifikasi semua barang yang akan disimpan di gudang.
 - c. Komplikasi data manajemen dalam proses penerimaan dan pengendalian kargo.
 - d. Mengatur penyimpanan kargo di lokasi yang ditentukan.
 - e. Menerima barang untuk didistribusikan berdasarkan permintaan.
 - f. Mengklasifikasikan produk menurut jenis dan kegunaannya.
 - g. Proses ekspedisi dan pengiriman barang dari gudang.
 - h. Mengumpulkan data produk dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan, melakukan aktivitas tambahan berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan.
 - i. Melaporkan kegiatan gudang secara berkala
 - j. Menyiapkan dokumen untuk semua kegiatan yang dilakukan di gudang.
- e. *Freight Forwarding*

Jenis layanan logistic yang lainnya adalah *freight forwarding*. Layanan ini terkait dengan impor dan ekspor barang melalui laut atau udara. Sub-sub layanan *freight forwarding*, yaitu :

a. *Internasional Air Freigh*

Internasional air freight service adalah layanan yang dibuka oleh PT Pos Indonesia sebagai salah satu solusi layanan transportasi pengiriman untuk memenuhi kebutuhan impor dan ekspor dengan angkutan udara. Layanan ini menggunakan kontrol pengiriman jarak pendek *point to point* untuk memastikan bahwa produk terkirim kepada penerima. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistic perusahaan impor dan ekspor yang mempengaruhi profitabilitas.

b. *Internasional Ocean Freight*

Internasional ocean freight adalah solusi fasilitas transportasi yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia bagi perusahaan import dan eksport yang ingin melakukan pengiriman secara langsung atau gabungan melalui jalur laut. Layanan ini juga menggunakan sistem pemantauan transportasi jarak dekat *peer to peer* untuk memantau proses pengiriman dengan seksama hingga barang sampai ke penerima.

c. *Customs Clearance*

Customs clearance adalah layanan yang digagas oleh PT Pos Indonesia berupa layanan kepabeanan melalui proses yang konsisten, cepat, dan efisien.

d. *Project Logistic*

Project logistic merupakan solusi untuk layanan transportasi dengan skala besar untuk ketujuan domestic ataupun internasional. Baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. *Project logistic* menawarkan

akan memberikan penanganan khusus untuk masing-masing jenis kargo berdasarkan permintaan.

2. Layanan Internasional

Selain layanan domestik PT Pos Indonesia juga menyiapkan layanan internasional. Layanan Internasional yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia memiliki 2 kategori, yaitu :

a. Layanan standar

Layanan standar adalah layanan PT Pos Indonesia melalui udara internasional dengan ketentuan pelayanan, sebagai berikut :

- 1) Waktu pengiriman atau estimasi waktu pengiriman adalah 6 hingga 10 hari.
- 2) Berat paket maksimum 2 kg.
- 3) Tidak memiliki status pencarian jika ada masalah dengan pengiriman sehingga tidak ada kompensasi.

b. Layanan prioritas

Selain layanan standar, PT Pos Indonesia juga memberikan pelayanan prioritas untuk berbagai sub pelayanan, yaitu :

1) *Express Mail Service* (EMS)

Express Mail Service (EMS) merupakan layanan kurir yang dapat dijangkau oleh berbagai negara. Layanan ini meliputi pendistribusian surat, dokumen, dan parcel dari dalam serta luar negeri. Dengan persyaratan :

- a. Perkiraan durasi pengiriman untuk pengiriman EMS yaitu 5 hari di luar waktu pemeriksaan pabean.

- b. Harga ditentukan menurut berat kiriman serta negara/kawasan tujuan dalam dollar AS.
- c. Persyaratan berat dan ukuran pengiriman berat maksimum dalam bentuk kiriman yaitu 2 kg.
- d. Batas skala surat paling tidak 90 x 140 mm atau sebesar surat pos.
- e. Berat maksimum yang dikirim sebagai kiriman atau komoditas yaitu 30 kg.
- f. Kapasitas maksimum barang dagang kurang dari 300 cm dan panjangnya kurang dari 150 cm.

Keuntungan dari layanan EMS, yaitu :

- a. Ada pelacakan kargo.
- b. Jika ada masalah dengan barang dagangan yang dikirim maka ada mekanisme jaminan atau kompensasi. Baik itu keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan formulir.
- c. Mencakup hingga 230 negara.
- d. Pembayaran secara kredit.

2) Paket *Internasional Express*

Paket *Internasional Express* merupakan layanan internasional yang disiapkan oleh PT Pos Indonesia dengan waktu pengiriman yang berbeda.

Dengan ketentuan layanannya, yaitu :

- a. Perkiraan waktu pengiriman yaitu 6-10 hari.
- b. Beban minimum dari ± 2 kg hingga maksimal 30 kg.
- c. Pengiriman mencapai 195 negara.

- d. Kapasitas pengiriman berat maksimal paket adalah 30 kg.
- e. Skala maksimum jumlah sisi kuang dari 300 cm dan panjangnya 150 cm.

3) Pos Ekspor

Pos ekspor merupakan layanan pengiriman barang ke luar negeri yang khusus untuk UKM Indonesia. Dengan persyaratan layanan, yaitu :

- a. Perkiraan waktu pengiriman adalah 4 sampai 8 hari
- b. Mencangkup hingga 232 negara.

4) Pos Tercatat Internasional

Pos tercatat internasional merupakan layanan transportasi internasional.

Dengan ketentuan layanannya, yaitu :

- a. Waktu pengiriman antara 6 sampai 10 hari
- b. Berat paket maksimal 2 kg.
- c. Memiliki fungsi pelacakan atau *tracking*.
- d. Kompensasi diberikan untuk masalah pengiriman.

5) E-Packet

E-packet merupakan layanan pengiriman dalam bentuk surat dan kargo.

Dengan ketentuan layanan, yaitu :

- a. Waktu pengiriman 6 sampai 10 hari.
- b. E-packet mencangkup 57 negara
- c. Berat maksimum 2 kg.
- d. Kapasitas minimal surat pos adalah 90 x 140 mm dan maksimum 120 x 235 mm.

- e. Kapasitas maksimum surat pos yaitu jumlah dari panjang + lebar + tinggi, tidak melebihi 900 mm, dan panjang maksimum satu sisi adalah 600 mm.
- f. Ukuran minimal benda silinder adalah panjang ± 2 (diameter) tidak kurang dari 170 mm. ukuran maksimum tidak melebihi 1.040 mm.
- g. Bagi kemasan besar, perhitungan volume akan menggunakan rumus (panjang x lebar x tinggi)/ 5000 x 1 kg.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Pos Indonesia

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta menaklukkan persaingan global adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik. PT Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG yang diperjelas dengan diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep117/MMBU/2002 Pasal 1 tentang Praktik GCG . Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan hukum dan nilai-nilai etika. Penerapan GCG juga menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan berdasarkan moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan secara konsisten.

Implementasi GCG Pada PT Pos Indonesia telah menghasilkan hal-hal penting, yaitu :

1. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor : KD. 52/DIRUT/0909 Tanggal 9 September 2009 tentang Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pos Indonesia.
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44 Dirut/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang Panduan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia.
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor: 357/Dekom/0914 dan Nomor: KD. 63/DIRUT/0914 tanggal 02 September 2014 tentang Board Manual PT Pos Indonesia.
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor: 439/Dekom/1014 dan Nomor: KD. 85/DIRUT/1014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct) Insan Pos Indonesia.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor:451/Dekom/1114 dan Nomor: KD. 87/DIRUT/1114 tanggal 06 November 2014 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia.

6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 125/Dekom/0415 dan Nomor: KD. 35/Dirut /0415 tanggal 24 April 2015 tentang Whistle Blowing System di PT Pos Indonesia.

7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 326/Dekom/1015 dan Nomor: KD. 86/DIRUT/1015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di PT Pos Indonesia.

Untuk memperoleh data tentang isu-isu GCG, peneliti mewawancarai beberapa informan, seperti departemen audit internal dan departemen sumber daya manusia PT Pos Indonesia. Wawancara Randy Rohmansia dari bagian SDM selaku peneliti ketika menanyakan tentang penerapan GCG PT Pos Indonesia, beliau mengatakan:

“Pengenalan GCG ke PT Pos Indonesia merupakan upaya pengelolaan perusahaan untuk mengoptimalkan nilai dan meningkatkan daya saing. Sehingga Anda dapat mempertahankan eksistensi Anda dan mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kepengurusan perusahaan ini ditentukan oleh KD (Keputusan Direksi) yang bertindak atas dasar nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap hukum dan pengakuan akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan lainnya,” kata Randy Rohmansia. .

PT Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bernaung di bawah Kementerian Negara BUMN yang telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang megacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 1 tentang *Good Corporate Governanc*. Prinsip-prinsip dasar GCG menurut pedoman GCG PT Pos Indonesia, yaitu :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan materi dan informasi terkait tentang perusahaan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan peran, praktik, dan tanggung jawab seluruh organisasi dan seluruh jajaran perusahaan sehingga perusahaan dikelola secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas, yaitu kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
4. Kewajaran, yaitu kewajaran dan loyalitas dalam memenuhi hak-hak pengambil keputusan yang dihasilkan dari kesepakatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kemandirian, inilah kondisi perusahaan yang dijalankan secara profesional, tanpa benturan kepentingan atau dampak/tekanan dari berbagai pihak dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Dari hasil wawancara dengan pihak audit internal dapat diketahui bahwa audit internal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan GCG di PT Pos Indonesia. Proses audit internal ini ada 2 yaitu untuk karyawan dilakukan oleh SDM dan untuk mengaudit tentang mutu dan SOP-nya itu dilakukan oleh auditor internal. Hal ini dilakukan 1 bulan 2 kali perkantor cabang. akan tetapi untuk keseluruhan dilakukan oleh kantor pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa hal yang dinilai oleh pihak auditor internal, beliau mengatakan bahwa:

“GCG di PT Pos Indonesia mengalami peningkatan di presentasinya. Ini bisa dilihat dari presentase GCG yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dan tentang penilaian dalam pengauditan PT Pos Indonesia itu sendiri antara auditor dan bagian SDM saling berkoordinasi untuk melaksanakan tugas *monitoring*, evaluasi, *supervise*, dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan” ujar Elvi Grace Apituley.

Dengan demikian, wawancara peneliti dengan auditor internal mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas baru *monitoring*, evaluasi, supervisi dan supervisi inilah yang dilihat oleh internal audit ketika melakukan proses audit di PT Pos Indonesia. Peneliti juga melakukan wawancara dengan departemen Sumber Daya Manusia tentang bagaimana audit internal dapat bermanfaat bagi GCG, dan mewawancarai Randy Rohmansya mengatakan “PT Pos Indonesia selalu dalam pengawasan dan SPTJ akan diberikan kepada karyawan jika terjadi *human error*”.

4.2.2 Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada PT Pos Indonesia

Peranan audit internal terhadap penerapan GCG pada PT Pos Indonesia berhubungan dengan 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang dijalankan PT Pos Indonesia. Peran audit internal adalah membantu direksi untuk melakukan pengujian secara periodik atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan efektifitas kegiatan melalui penilaian yang independen.

Untuk mencapai tujuan SPI PT Pos Indonesia sebagai unit fungsional yang bertanggung jawab atas Direktur Utama harus berperan secara optimal dalam mendukung Direktur Utama dalam fungsi pengawasan. SPI harus mampu memberikan informasi dan saran atas kelemahan operasional dan pengendalian internal keuangan terkait kepatuhan, pengukuran kinerja dan efektivitas seluruh lini organisasi di dalam perusahaan. Berikut ini adalah analisis penerapan GCG pada PT Pos Indonesia :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

- “PT Pos Indonesia memberikan informasi kepada seluruh karyawan dengan melakukan sharing knowledge setiap sebulan sekali. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada para karyawan terhadap informasi-informasi terbaru yang pusat keluarkan” ujar Randi Rohmansyah. Selain itu, semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan maupun kepala kantor atau wakil kepala kantor dapat diakses melalui website kantor yang hanya diakses oleh karyawan PT Pos Indonesia.
- Terdapat website PT Pos Indonesia yang menyediakan informasi publik mengenai profil, aktivitas, dan sejarah perusahaan. Website PT Pos Indonesia dapat dilihat di www.posindonesia.com.
- Adanya dewan komisaris yang bekerja untuk mengamati tindakan direksi dan juga berhak dalam memberikan nasehat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dewan komisaris harus pula memantau efektifitas praktek GCG yang

diterapkan oleh PT Pos Indonesia. Dalam membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat menentukan untuk membentuk komite-komite.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- “PTPos Indonesia memiliki sistem manajemen perusahaan yang mendukung klarifikasi fungsional, implementasi perusahaan dan penciptaan akuntabilitas melalui struktur organisasi, uraian tugas, kode etik, dan SOP tertulis internal yang terperinci. Setiap komponen memiliki wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. konsisten dengan visi, misi, nilai, tujuan bisnis, dan strategi perusahaan, sehingga tidak ada rasa malu atau kehampaan di dalam perusahaan.” ujarnya kepada Randi Rohmansyah.
- “PT Pos Indonesia memiliki sistem pelaporan dan pengaduan pelanggaran karyawan sesuai dengan SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jika terjadi *human error* maka karyawan ditindak lanjuti dengan diberikan SPTJ sesuai dengan SOP perusahaan”ujar Randi Rohmansyah.
- PT Pos Indonesia memiliki *Code Of Conduct* sesuai dengan keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44/DIRUT/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang Panduan Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia Perusahaan tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

- PT Pos Indonesia selalu mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab kepada pemegang saham, karyawan, konsumen, mitra usaha, kreditur dan lingkungan untuk menjamin kelangsungan usaha jangka panjang.
- Tanggung jawab kepada masyarakat adalah perusahaan selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki banyak karakteristik. Dengan ini, perusahaan berjanji bahwa hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar adalah fondasi utama kesuksesan jangka panjang perusahaan.
- Pertanggungjawaban terhadap media massa adalah memberikan informasi relevan dan berimbang kepada media massa.
- Pertanggungjawaban terhadap pemerintah adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah.

4. Independensi (*Independency*)

- - PT Pos Indonesia memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara mandiri sesuai dengan pedoman dan tanggung jawab masing-masing individu dan tidak ada rangkap jabatan atau hubungan keluarga di lingkungan departemen. Hal ini tertuang dalam Kode Etik dan SOP.
- - Seluruh bagian perusahaan menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaan yang diatur dalam SOP.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness and Equity*)

- “PT Pos Indonesia selalu menjaga hubungan dengan karyawan dengan mengawasi hak dan kewajiban para karyawan” ujar Elvi Grace Apituley .
- Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara professional, PT Pos Indonesia tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan juga kondisi fisik (jika sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan).

Oleh karena itu, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran audit internal sebagai unit pengawasan perusahaan dan audit internal adalah melakukan review KCP secara berkala setiap bulan. Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan GCG. Oleh karena itu, audit internal berperan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT Pos Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Pos Indonesia yang beralamat di Jalan Slamet Riadi No. 10, Bulu Daging, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan terangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Pos Indonesia yaitu sebagai salah satu perusahaan yang bernaung di bawah Kementerian Negara BUMN telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sesuai dengan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 1 tentang *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam pengelolaan bisnis perusahaan, PT Pos Indonesia mengutamakan kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnis perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Peran audit internal dalam mencapai *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia dilakukan oleh PT Pos Indonesia, dan lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi. , terkait dengan keadilan. Peran audit internal adalah sebagai badan pendukung untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya memantau, mengevaluasi, mengawasi dan mengawasi pengelolaan perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti internal audit memberikan landasan teori lain yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* selain landasan teori peranan audit internal yang diteliti oleh penulis.

2. Bagi PT Pos Indonesia

Diharapkan memberikan bantuan terhadap auditor agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor untuk meningkatkan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Aulia Maghfirah. 2020. *Pengaruh Internal Audit Dan Penerapan Good Corporate Governance Fraud Pada PT Bumi Karsa Makassar*. Skripsi Universitas Bosowa
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HELTS) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Erniwati, Andi. 2018. *Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Sulselbar Kota Makassar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurans*. Jakarta. Grasindo
- Iryana dan Risky Kawasati. 2018. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Jusuf, Al Hartono. (2017). *Auditing (Pengauditan)*. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Kompas. Diakses pada 11 Maret 2021. www.kompas.com
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Yayasan Pendidikan Internal Audit. Jakarta.
- Ode, Riski Amalia. 2017. *Peran Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Sulselbar Makassar*. Skripsi Universita Hasanuddin.
- Pos Indonesia. 2020. Diakses pada 20 Agustus 2021 di www.posindonesia.co.id.
- Pratiwi, Siti Ulfia Ari Pratiwi. 2016. *Peran Audit Terhadap Good Corporate Governance Pada PT Semen Tonasa*. Skripsi Universitas Bosowa.
- Rezeki, Nur Asrifa Salam. 2011. *Peran Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Bank XYZ Tbk Kanwil X*. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Rizal, Ahmad Khairul. 2020 . *Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance Pada PD Pembangunan Kota Medan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications*
- Sapsepti, Gita. 2017. *Pengaruh Profibilitas Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi Universitas Pasudan.
- Sari, Milya dan Asmendri. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. (6), No. (1).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suripatty, Roberthair. 2021. *Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victory Sorong*. Volume XV, Nomor 1, Maret 2021.
- Valery, G Kumaat. 2011. *Internal Audit*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta : Erlangga.



UNIVERSITAS
BOSOWA